

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka menjelaskan beberapa hasil teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

###### **2.1.1.1 Definisi Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

###### **2.1.1.2 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan**

Definisi standar akuntansi pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Pasal 1 Ayat 3 tahun 2010 yaitu:

“Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli untuk bentuk formal, perioditas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.”

Menurut Indra Bastian (2019:139), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAP adalah salah satu kegiatan dalam meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.”

Menurut Abdul Halim (2019:143), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar.”

Menurut Yoyo Sudiryo (2017:33), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.”

Menurut Baldric Siregar (2017:104), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat PSAP. “

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dengan tujuan untuk memenuhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.”

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai standar akuntansi pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena standar akuntansi pemerintah mempunyai kekuatan hukum.

### **2.1.1.3 Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Menurut Nurmalia Hasanah (2017:27), Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan SAP merupakan bentuk dari pengaplikasian prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP yang diwajibkan untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.”

Menurut Andy P Hamzah (2014:13), Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan SAP dimulai dari penyusunan yang dilakukan melalui suatu proses yang sistematis (due process) yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi. Tahapan penerapan SAP dimulai dari pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP sampai dengan pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Menurut Mahmudi (2016:271), Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, alasannya karena standar akuntansi pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintah.”

Menurut Henukh et al., (2020), Definisi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah bentuk dari sistem akuntansi yang berlandaskan pada standar akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah yang memberikan kemajuan bagi laporan keuangan menjadi lebih efektif dan transparan.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sangat penting untuk diterapkan karena standar

akuntansi pemerintah (SAP) merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat/daerah dalam kegiatan mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **2.1.1.4 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Mahmudi (2016:271-272), Pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. “Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensinya, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
5. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.”

Menurut Mardiasmo (2018:186), Pentingnya Penerapan SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah adalah akuntansi berbasis aktrual yang dianggap penting dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis aktrual lebih baik dibandingkan akuntansi basis kas, hal ini diyakini jika bahwa akuntansi berbasis aktrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.”

Sedangkan menurut Muhammad Ichlas (2014), Pentingnya SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah (SAP) penting diterapkan sebagai landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat/daerah dalam melakukan pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dengan baik dan benar.”

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Aktrual sudah harus diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2010, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Dengan begitu, pemerintah memerlukan standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan diterapkannya PP mengenai SAP maka pemerintah pusat/daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **2.1.1.5 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Indra Bastian (2019:39), Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.”

Menurut Abdul Halim (2019:165), Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan, yaitu:

1. “Tujuan untuk pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat
2. Tujuan untuk manajerial, dalam tujuan ini memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

3. Tujuan untuk pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.”

Menurut Mahmudi (2016:271), Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah merupakan aspek penting yang diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah.”

Menurut Nugraeni dan Budiantara (2015), Tujuan SAP pada lembaga pemerintah adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan akan memiliki banyak manfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum dengan kualitas yang lebih baik lagi bagi para pengguna laporan keuangan.”

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Tujuan SAP adalah sebagai berikut:

“Standar akuntansi pemerintah bertujuan agar laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada instansi pemerintahan dilakukan berdasarkan PSAP No. 01 mengenai penyajian laporan keuangan, didalam PSAP No. 01 ini di jelaskan bahwa tujuan umum dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan

dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

#### **2.1.1.6 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh atas pencapaian penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat penerapan standar akuntansi adalah sebagai sebuah informasi mengenai keuangan pemerintah.

Menurut Rindu Rika Gamayuni (2018:12), menyebutkan bahwa standar akuntansi memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. “SAP menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. SAP menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. SAP menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. SAP menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. SAP menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. SAP menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagaimana akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”

Menurut Mardiasmo (2018:186), Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan dengan diterapkannya akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi basis kas. Akuntansi basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi, sosial, dan politik.”

Menurut Nurmalia Hasanah (2017:26), manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“SAP bermanfaat sebagai sebuah sistem pemecahan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, maka dari itu SAP yang kredibel sangat diperlukan dalam sector pemerintahan.”

Menurut Enda Baisida Lauma, dkk (2016) tentang manfaat standar akuntansi pemerintah, yaitu:

1. “Dapat digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
2. Dapat digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
3. Dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.
4. Dapat diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan.
5. Dapat menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.”

Berdasarkan penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diharapkan mampu bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Dengan penerapan SAP diharapkan dapat memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya, dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah dan perubahannya, dapat memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya serta memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya, memenuhi kewajiban dan komitmennya.

### 2.1.1.7 Jenis Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah berbasis akuntansi, dimana basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi. kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*Accrual basis of accounting*). Basis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui Ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah, sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau dibayar (Dwi Ratmo dan Mahfud Sholihin, 2015:11).

Secara lebih terperinci lagi mengenai standar akuntansi yang terdiri dari beberapa jenis basis dijelaskan oleh Rahayu et al. (2014), Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu :

1. SAP berbasis akrual Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintah adalah ununtuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan baik ekonomi, social, maupun politik.
2. SAP berbasis kas menuju akrual SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.”

Berdasarkan penjelasan diatas penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di perjelas oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi. Akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan.

#### **2.1.1.8 Unsur-unsur Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Abdul Halim (2019:167), Prosedur dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset.”

Adapun penjelasan terkait dengan prosedur penerapan standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD.

## 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD.

## 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas.

## 4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah-tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan.

Menurut Baldrick Siregar (2017:105), Prinsip dalam standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. "Basis Akuntansi
2. Realisasi
3. Substansi mengungguli bentuk formal
4. Konsisten

## 5. Penyajian secara wajar”

Adapun Penejelasan terkait dengan prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

### 1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

### 2. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

### 3. Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya,

maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 4. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

#### 5. Penyajian secara wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

### **2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dan dilakukan secara terus menerus dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016:252), mendefinisikan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yaitu sebagai berikut :

“Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada Tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus”.

Menurut Nurul Latifah (2021:2), mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah salah satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personal lain pada suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Suwanda (2017:68-69) pengertian sistem pengendalian internal pemerintah adalah:

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi mengenai sistem pengendalian internal pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah secara menyeluruh yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen serta personal lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya

tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi dengan mendapatkan kesempatan serta dapat mencegah adanya risiko kerugian serta tindak kecurangan (*fraud*) baik dari dalam maupun luar instansi.

Menurut Mahmudi (2016:252), tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk:

1. “Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sesuai dengan pasal 1 ayat 2 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. “Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah
2. Keandalan dalam pelaporan keuangan
3. Keamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku.”

Menurut Mulyadi (2017:129) menjelaskan mengenai tujuan dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. “Menjaga aset organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”

### **2.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut Mahmudi (2016:253) sebagai berikut :

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern”

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah diatas berikut penjelasannya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan
- e. Pendeglegasian wewenang serta tanggungjawab yang tepat
- f. Kebijakan pembinaan SDM yang sehat
- g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah

## 2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- a. Reviu atas kerja instansi pemerintah
- b. Pembinaan SDM
- c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik aset
- e. Penetapan reviu indikator serta ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi transaksi dan kejadian penting
- h. Pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas kejadian transaksi
- i. Pembatasan akses atas sumber daya serta pencatatan
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya
- k. Dokumentasi SPI

## 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya pendukung dari elemen sistem pengendalian intern pemerintah lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan atau rekannya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Selain itu

informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa complain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasi ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan di semua level wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif. Oleh karena itu pimpinan harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui manajemen sistem informasi

#### 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian internal pemerintah pada dasarnya untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern popemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sesuai yang diharapkan. Kegiatan pemantauan meliputi :

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Melakukan tindak lanjut

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, menyatakan unsur-unsur SPIP yaitu sebagai berikut:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan”

Berdasarkan kelima unsur diatas Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendeglegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

### 2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko yaitu terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

### 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta

fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian internal pemerintah meliputi:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik dan sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

#### 5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

#### **2.1.2.4 Fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Mahmudi (2016:252) system pengendalian internal pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. “Pengendalian Preventif
2. Pengendalian Detektif
3. Pengendalian Korektif”

Berdasarkan ketiga fungsi utama diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman yang terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem prosedur melalui fraud control plan.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi. Pengendalian deketif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan, rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV dan alarm.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian korektif digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan back-up file dan copy dokumen.

Menurut Karyono (2013:50) sistem pengendalian internal pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

1. “Pengendalian Preventif
2. Pengendalian Detektif
3. Pengendalian Korektif
4. Pengendalian Langsung
5. Pengendalian Kompensatif “

Berdasarkan fungsi sistem pengendalian intern diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta antisipasi manajemen sebelum masalah yang tidak diinginkan terjadi.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian ini menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi, seperti rekonsiliasi bank, control hubungan, observasi kegiatan operasional dan sebagainya.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian ini merupakan upaya mengkoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi melalui pengendalian detektif, sehingga antisipasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi berulang di masa yang akan datang.

4. Pengendalian Langsung

Pengendalian ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti supervisi

oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerjaan.

#### 5. Pengendalian Kompensatif

Pengendalian ini merupakan upaya pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya pencatatan pengawasan langsung oleh pemilik terhadap kegiatan pegawai usaha kecil. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya ketidakjelasan pemisahan fungsi karena pegawainya sedikit.

#### **2.1.2.5 Karakteristik Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Kegiatan Pengendalian disebutkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

1. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
  - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian
  - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
  - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
  - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis dan

- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
3. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
    - b. Pembinaan sumber daya manusia
    - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
    - d. Pengendalian fisik atas asset
    - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
    - f. Pemisahan fungsi
    - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
    - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
    - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
    - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
    - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2016:254) karakteristik sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan stuktur organisasi.
- e. Pendelegasian tugas dan wewenang.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran pengawas internal.
- h. Pengendalian umum.
- i. Pengendalian aplikasi.
- j. Informasi dan komunikasi.
- k. Pemantauan (*monitoring*)

Pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Inernal, dilakukan:

- a. Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, peningkatan kompetensi

auditor aparat pengawasan internal pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

### **2.1.2.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pengendalian internal pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern pada entitas. Kemungkinan dalam pencapaian tersebut dipengaruhi adanya keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal tersebut.

Menurut Syaiful Bahri (2022:55) hal-hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. “Kepantasan tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi
2. Kenyataan kesalahan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan terdapat adanya kesalahan
3. Gangguan oleh kegagalan personal
4. Tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian internal
5. Adanya kolusi antar pihak yang mengganggu fungsi pengendalian internal
6. Adanya kejadian-kejadian yang berada diluar kendali entitas “

Menurut Nurul Latifah (2021:23) mengemukakan keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabdian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat”

Berdasarkan keterbatasan diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan anggota lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam

melaksanakan tugas rutin karena informasi tidak memadai, keterbatasan waktu dan tekanan lainnya.

## 2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena anggota secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya perhatian atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam anggota atau dalam sistem serta prosedur dapat mengakibatkan gangguan.

## 3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

## 4. Pengabdian oleh manajemen

Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau ketaatan semu.

## 5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengeukuran secara tidak tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi adalah karakteristik dasar atau kemampuan sumber daya manusia dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM.

Menurut Sedarmayanti (2016:286) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia ialah :

“Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang yang melekat pada manusia itu sendiri dalam arti dapat ditunjukkan dalam hal wewenang, dan tanggungjawab yang memiliki kemampuan (*Competency*), yaitu: Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*Skill*), dan sikap perilaku (*Attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Wirawan (2015:1), definisi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia merupakan orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia merupakan dasar dan kunci dari semua sumber daya organisasi. Sumber-sumber lainnya hanya dapat diperoleh dan berfungsi jika organisasi mempunyai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan dan kesehatan fisik jiwa yang prima, bertalenta, mempunyai

etos kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi berbeda antara sukses atau gagal. Efektivitas dan efisien sumber-sumber organisasi lainnya hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusianya berkualitas.”

Menurut Achmad S. Ruky (2013:106) mendefinisikan kompetensi sebagai:

“Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.”

Sedangkan pengertian kompetensi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pekerjaan, pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) sehingga seseorang tersebut dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

### **2.1.3.2 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut.

Menurut Wibowo (2013:97) adalah sebagai berikut :

1. *Planning Competency*;
2. *Influence Competency*;
3. *Communication Competency*;
4. *Interpersonal Competency*;

5. *Thinking Competency*;
6. *Organizational Competency*;
7. *Human Resources Management Competency*;
8. *Leadership Competency*;
9. *Client Service Competency*;
10. *Self Management Competency*;
11. *Business Competency*;
12. *Technical/Operasional Competency*;

Beberapa tipe kompetensi sumber daya manusia diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Planning Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
3. *Communication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*, meliputi empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6. *Organizational Competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partiipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
8. *Leadership Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.
9. *Client Service Competency*, merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.
10. *Business Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
11. *Self Management Competency*, kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
12. *Technical/Operasional Competency*, kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer,

menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Menurut Michael Zwell (2013:330) memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari :

1. *Task achievement* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
2. *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan *relationship* meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antarpribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.
3. *Personal attribute* merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal attribute* merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
4. *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi

*managerial* berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership* merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan *leadership* meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

### **2.1.3.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-baiknya. Bahkan harus sesempurna mungkin.

Menurut Doni Juni Priansa (2014:147), pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses dari pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Pelatihan

Penjelasan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

## 1. Pendidikan

Berkaitan dengan pengetahuan secara umum. Terdapat dua level utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan, yaitu manajer organisasi dan tenaga operasional.

### a. Manajer Organisasi (Manajerial)

Pendidikan bagi manajer organisasi ditujukan dengan berfokus pada peningkatan kemampuan pengetahuan manajer serta kemampuan manajer organisasi untuk keterampilan dalam mengambil keputusan.

### b. Staf Pegawai (Operasional)

Pendidikan bagi staf pegawai operasional dapat dilakukan melalui pelatihan kerja dan apprenticeship, dimana pendidikan tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi, meningkatkan moral, serta mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas organisasi.

## 2. Pelatihan

Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengembangkan pekerjaan tertentu sesuai dengan pekerjaan terakhir yang dimiliki pegawai. Pelatihan juga dilakukan dalam rangka updating pegawai.

### **2.1.3.4 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Sudarmanto (2015:53) terdapat 5 (lima) komponen Kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan

2. Sifat (*traits*), adalah karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan suatu hal yang kompleks
5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Menurut Sedarmayanti (2016:286) menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Sikap perilaku (*Attitude*)

Adapun penjelasan mengenai karakteristik sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi dari perusahaan.

2. Keterampilan (*Skill*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programmer komputer. Disamping pengetahuan dan kemampuan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

### 3. Sikap Perilaku (*Attitude*)

Pola tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan pemerintahan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (*Visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

Menurut Sudarmanto (2015:53), mengatakan bahwa konsep diri (*self-concept*), watak/sifat (*traits*) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (*hidden*), dalam (*depper*) dan berbeda pada titik sentral kepribadian seorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab-akibat yang menunjuk bahwa tujuan, perangsang, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan yang kemudian mempraktikkan kinerja kompetensi mencakup nilai, tindakan dan hasil. Misalnya motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk

berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya perilaku kewirausahaan, penentuan yujuan, bertanggungjawab atas hasil akhir dan pengambilan risiko yang diperhitungkan.

Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi dan pengertian kompetensi ini dapat kita padukan dengan keterampilan dasar (*soft skill*), keterampilan baku (*hard skill*), keterampilan sosial (*social skill*), dan keterampilan mental (*mental skill*). Keterampilan baku (*hard skill*) mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM; Keterampilan dasar (*soft skill*) menunjukkan intuisi dan kepekaan SDM; Keterampilan sosial (*social skill*) menunjukkan dalam hubungan sosial; keterampilan mental (*mental skill*) menunjukkan ketahanan mental SDM.

#### **2.1.3.5 Faktor-faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Semua organisasi tentu menginginkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap factor-faktor determinan bagi kompetensi.

Menurut Sudarmanto (2015:54) terdapat tujuan determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yakni:

1. Kepercayaan dan nilai  
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berfikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan memberikan tantangan bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah, namun hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama karena nilai dan kepercayaan seringkali telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi

berakar pada budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.

2. Keahlian/keterampilan

Aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kompetensi, sebagai contoh, *public speaking* adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan/organisasi dan kompetensi individu.

3. Pengalaman

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas yang diberikan. Seseorang dengan sejumlah pengalaman tertentu akan lebih mudah mengorganisir orang lain dalam organisasi yang kompleks dengan penguasaan kompetensi manajerialnya yang tinggi dan akan sangat berbeda apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri seseorang akan menjadikan orang tersebut memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat *introvet* akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat *ekstrovet*. Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

5. Motivasi

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang cenderung dapat diubah. Dorongan, pengarahan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

6. Isu-isu emosional

Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Kekuatan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, melakukan beberapa terapi, melakukan seseorang agar dapat mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut.

#### 7. Kapasitas Intelektual

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan nilai sebagainya.

### 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### 2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap organisasi publik maupun nonpublik diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang dapat berguna bagi pihak yang berkepenting, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus mengacu pada standar yang berlaku dan memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas. Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya. Berikut pengertian kualitas laporan keuangan intansi diantaranya, sebagai berikut:

Menurut Erlina Rosdianto (2013:146), Definisi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Winwin Yadiani (2017:32), Definisi Kualitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

“Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna (*User's need*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap pemilik (*Investor's Protection*) dengan

mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.”

Menurut Mahmudi (2016:13), Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan tujuan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Indra Bastian (2019:45) Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan adalah suatu gambaran untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Menurut Rama Ardianto dan Chermian Eforis (2019), Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah idealnya suatu laporan keuangan serta kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik serta laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan informasi terbaik bagi para penggunanya.

#### 2.1.4.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 24 menjelaskan mengenai laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Menurut Erlina Rosdianto (2013:15), Definisi Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi-transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan.”

Menurut Mahmudi (2016:15), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.”

Menurut Winwin Yadianti (2017:6), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan satu dari berbagai informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Mardiasmo (2018:125) adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.”

Sedangkan Menurut Indra Bastian (2014:297), menyatakan tentang laporan keuangan sektor public sebagai berikut:

“Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.”

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi mengenai pemerintahan serta laproan keuangan pemerintah dibuat sebagai gambaran kinerja pemerintahan yang telah dilakukan baik atau tidaknya. Adapun menurut Kementrian Keuangan RI yang menjelaskan bahwa laporan

keuangan pemerintah dibuat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 sesuai dengan paragraf 9 Lampiran II tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sesuai dengan paragraf 26 tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi, kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.”

Adapun menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”

Menurut Kasmir (2018:10), Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.”

Menurut Winwin Yadianti (2017:6), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dengan laporan keuangan pihak eksternal yaitu investor dapat mengetahui tingkat keamanan investasinya serta dividen yang diharapkan dan bagi kreditur bertujuan dapat mengetahui dan memprediksikan kestabilan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.”

#### **2.1.4.4 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui nilai

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun peranan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan suatu entitas dalam melaksanakan peranannya terhadap laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
5. Evaluasi Kerja”

Berikut penjelasan Penerapan Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas artinya akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen artinya manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi artinya transparansi dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi artinya membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja artinya mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut Mursyidi (2013:44), Peranan Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)”

Berikut penjelasan peranan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 2.1.4.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bedasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis aktual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan perubahan SAL)
3. Laporan operasional (LO)
4. Laporan perubahan ekuitas (LPE)
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).”

Berikut uraian mengenai komponen laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan pos-pos berikut seperti saldo-saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Klasifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas, tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan

dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara.

Menurut M. Ramli Faud (2016:7), Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri atas berikut ini:

1. “Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.”

Adapun penjelasan terkait laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, Investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas. pengeluaran, dan saldo akhir has pemerintah daerah selama periode tertentu.

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### 5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Serta laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **2.1.4.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif pelaporan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif atas informasi tersebut berkaitan erat dengan pengakuan, dimana ditunjukkan dengan adanya konsep materialitas yang merupakan dasar atau bisa dikatakan ambang pintu dari pengakuan itu sendiri.”

Menurut Indra Bastian (2019:48), Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Mahmudi (2016:106), Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya, yaitu:

1. Relevan (*Relevance*)
2. Andal (*Reliability*)
3. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)
4. Dapat Dipahami (*Understandability*).”

Berikut adalah penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Relevan

Relevan artinya laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu artinya informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

## 2. Andal

Andal artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat Dibandingkan

Dapat dibandingkan artinya Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

#### 4. Dapat dipahami

Dapat Dipahami artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Winwin Yadianti (2017:16-17) menjelaskan tentang karakteristik

kualitatif, yaitu:

1. “Relevan (*Relevance*), yaitu melakukan seleksi informasi yang paling mungkin membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi para pengguna.
2. Dapat Dipahami (*Understandability*), yaitu informasi terpilih tidak hanya penting tapi harus dapat dimengerti pengguna.
3. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), yaitu hasil akuntansi dapat dikuatkan oleh pihak lain dengan menggunakan teknik pengukuran yang sama.
4. Kenetralan (*Neutrality*), yaitu informasi akuntansi daraskan pada kebutuhan umum para pengguna bukan hanya sekedar kebutuhan khusus pengguna tertentu.
5. Tepat Waktu (*Timeliness*), yaitu pemberian informasi dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), yaitu perlakuan akuntansi yang berbeda tidak seharusnya memberikan hasil yang berbeda.
7. Kelengkapan (*Completeness*), artinya informasi yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pemakai.”

#### 2.1.4.7 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah:

1. “Masyarakat
2. Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, dan Lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerinta”

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2019:40), menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *stakeholders* yang meliputi:

1. “DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) artinya adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.
2. Badan Pengawas Keuangan Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi dan akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain.
5. Rakyat Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk/jasa dari pemerintah daerah.
6. Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.”

#### 2.1.4.8 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

##### Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Vika Erinna et al. (2020) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Kompetensi sumberdaya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi terhadap kinerja.
3. *Good Governance*  
*Good governance* merupakan system dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efisiensi sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang Makmur, sejahtera dan mandiri

Sedangkan Menurut Asep Hilman (2019) ,faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah  
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia  
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan mampu memahami proses dan logika akuntansi dengan baik.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya adalah komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.”

### **2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian terkait dengan variabel-variabel yang tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	1. Rama Ardianto 2. Chermian Eforis	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang) (2019)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini adalah: 1) Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 3) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 4) Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah, 5) Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	1. Ni Made Sudiarianti 2. I Gusti Ketut Agung Ulupui 3. I G.A. Budiasih	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2015)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.	Yusup Komarudin	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung) (2015)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variabel berpengaruh signifikan secara parsial, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Kedua hasil penelitian ini dikategorikan ke dalam kedua kategori, hal ini menunjukkan bahwa standar dan sistem belum

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
				sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah.
4.	1. Evi Rahmawati 2. Sari Sonita 3. Arif Wahyu Nur Kholid 4. Hafiez Sofyani	Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi (2022)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, sistem pengendalian intern memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
5.	1. Hadi Jauhari 2. Suhairi Hazisma 3. Evada Dewata	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (2021)	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, tetapi sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh antara standar akuntansi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
				pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6.	1. Yusrianti 2. Entar Sutisman 3. Yana Ermawati 4. Ridwan Rumasukun 5. Septyana Prasetianingrum	Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Jayapura (2021)	Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, dan Komitmen Organisasi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi SDM, Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Komitmen Organisasi memoderasi semu (Quasi Moderator) dengan memperkuat pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Komitmen Organisasi memoderasi murni (Pure Moderator) dengan memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
				Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Komitmen Organisasi memoderasi murni ( <i>Pure Moderator</i> ) dengan memperkuat pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.
7.	Asyiyhatul Latifah	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul) (2017)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,049. Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM, dan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, karena nilai signifikan > 5%.
8.	1. Dananjaya Dipta Admaja	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya	Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
	2. Sri Dewi Wahyundaru	Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (2020)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan.	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang.
9.	1. Dewi Andini 2. Yusrawati	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan (2016)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.
10.	1. Ruslina Lisda 2. Liza Laila Nurwulan 3. Lisna Septianisa	Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan	Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM, dan Kualitas	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
		Keuangan (Survey Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat) (2018)	Laporan Keuangan.	(SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
11.	1. Sri Mulyati 2. Ridwan Ibrahim 3. Muslim A. Djalil	<i>The Effect Of Government Accounting Standard, Quality Of Human Resource, Effectiveness Of Internal Control System And Regional Financial Accounting System On The Quality Of Regional Government Financial Statement (Study On SKPK Aceh Singkil District. Aceh Province Indonesia) (2021)</i>	<i>Government Accounting Standard, Quality Of Human Resource, Effectiveness Of Internal Control System, Regional Financial Accounting System, and Quality Of Regional Government Financial Statement</i>	<i>The results showed that government accounting standard, the quality of human resource, the effectiveness of the internal control system and the regional financial accounting system have a significant influence on the quality of local government financial reports of the regency.</i>
12.	1. Mery Sutrisna 2. Nadirsyah 3. Indayani	<i>The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study</i>	<i>Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Application of Government Accounting Standards, and The Quality</i>	<i>The results of this study indicate that the competence of human resources, utilization of information technology, internal control, and SAP implementation together affect the quality of financial reporting. Furthermore, the results of the partial study show</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
		<i>on South Aceh Government SKPK) (2022)</i>	<i>Financial Reporting.</i>	<i>that HR competence affects the quality of financial reporting, the use of information technology affects the quality of financial reporting, internal control affects the quality of financial reporting, and the application of SAP affects the quality of financial reporting in the South Aceh Government SKPK.</i>
13.	1. Wiwiek Mardawiyah Daryanto 2. Bianda Puspita Sari 3. Michelle Ayu Anggita Putri	<i>Effect Of Human Resources Competence, The Use Of Information Technology, And Internal Control System Of The Quality Of Local Government Financial Reporting (2020)</i>	<i>Human Resources Competence, The Use Of Information Technology, Internal Control System of The Quality, and Local Government Financial Reporting</i>	<i>The results of the partial research on the competence of human resources have a significant effect on the financial quality of local governments with a significance level of 0.039, the use of information technology has a significant effect on the quality of financial reporting of local governments with a significance level of 0.002, and the internal control system has no significant effect on the level of significance of financial reporting</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
				<i>quality of local governments with a significance level of 0.157 which is greater than the 0.05 significance level.</i>

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Menurut Mahmudi (2016:271) menjelaskan mengenai pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah, selain itu penyajian laporan keuangan, auditor, masyarakat pengguna laporan keuangan, organisasi profesional akuntansi, akademis, dan pemerintah merupakan bagian dari pihak berkepentingan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang didasarkan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah.”

Menurut Winwin Yadianti (2017:9), tentang hubungan SAP dengan Kualitas pelaporan adalah sebagai berikut:

“Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan salah satunya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimana harus sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendorong terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni dan Muhammad Budiantara (2015), yang menjelaskan terkait penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan yaitu, dengan diterapkannya SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah saling terikat satu sama lain, Penerapan SAP dapat memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah mengenai laporan keuangan pada pemerintahan, yang diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak (Adhitama, 2017)

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka SAP merupakan prinsip penting yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Rukmini juwita (2013) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintahan terlihat dari informasi yang disajikan baik atau tidaknya dalam sebuah laporan keuangan hal ini dijelaskan oleh Susilawati (2014) yang menjelaskan bahwa SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi.

Adapun mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuktikan oleh penelitian Yusup Komarudin (2015) tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Bandung, yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di kota Bandung Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Dan juga penelitian ini sejalan dengan Penelitian Sudiarianti et al. (2015) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan dan penjaminan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, dengan terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dan benar maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam laporan akan berkualitas dengan baik.

### **2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016:265), mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang memadai maka berbagai penyimpangan, kecurangan, korupsi dan kesalahan dapat diminimalisir sehingga aset-aset organisasi dapat terlindungi. Selain itu sistem pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berdampak pada kualitas tata kelola organisasi.”

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dimana jika sistem pengendalian internal semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Arthur Simanjuntak (2020), menjelaskan mengenai Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladan laporan keuangan yang efisiensi dan efektivitas. Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga et al. (2022), menjelaskan mengenai Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan memantau serta memberikan jaminan serta kepastian yang memadai untuk tercapainya suatu tujuan secara efektif serta efisien dan menyelenggarakan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas maka penyusunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai SPIP.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elvin Andrianto (2017), Ikyarti dan Aprila (2019), Ridzal et al. (2022), bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik serta memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah tersebut.

### **2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintah untuk mencapai tujuan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan. Sehingga sumber daya manusia sangat berperan penting dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pun akan meningkat.

Menurut Azhar Susanto (2017:253-254) menyatakan bahwa :

“Sumber daya manusia terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, pendistribusian dan pemanfaatan informasi. Keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) ini sebagai pemantau, pengoperasi, dan pengguna SI atau SIA telah memberikan dampak kepada manajemen serta ikut menentukan tingkat kesuksesan suatu organisasi perusahaan.”

Menurut Sari Sonata et al. (2022) menyatakan bahwa:

“Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam menyajikan dan mengelola anggaran pada suatu entitas, dapat menjadi tantangan pada pegawai untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat dan cepat, kemampuan dan keterampilan setiap pegawai akan dinilai pada bidang akuntan. Sumber daya yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik serta pemahaman yang mendalam akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah”.

Menurut Subramony et al. (2018) dan Usman et al. (2021) menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu entitas, karena tujuan yang hendak di capai, hasil kinerja keuangan, kerja sama yang baik, dan keputusan-keputusan diambil bergantung pada kemampuan tiap individu yang berdampak terhadap organisasi”.

Hasil penelitian pun menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM menjadi tujuan untuk menjadi pembentuk kinerja (Dayanti, 2022). Dan hasil lainnya menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Serta hasil penelitian yang adapun menyatakan bahwa kompetensi SDM mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menghasilkan laporan keuangan (Pramudityo, 2017).

Berdasarkan kutipan diatas membuktikan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia secara langsung berpengaruh dan signifikan terkait dengan keterampilan,

pengetahuan, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, dimana dapat berpengaruh besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah.

#### **2.2.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Irwan yang dikutip oleh Sudiarianti et al., (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan memenuhi empat karakteristik yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Julio Swastika dan Widhiyani (2020), mengemukakan bahwa Laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka memerlukan sistem pengendalian internal pemerintah yang harus memadai. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai, maka dalam segala kegiatan terutama dalam bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut penelitian yang dilakukan Rama Ardianto dan Chermian Eforis (2019), menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan

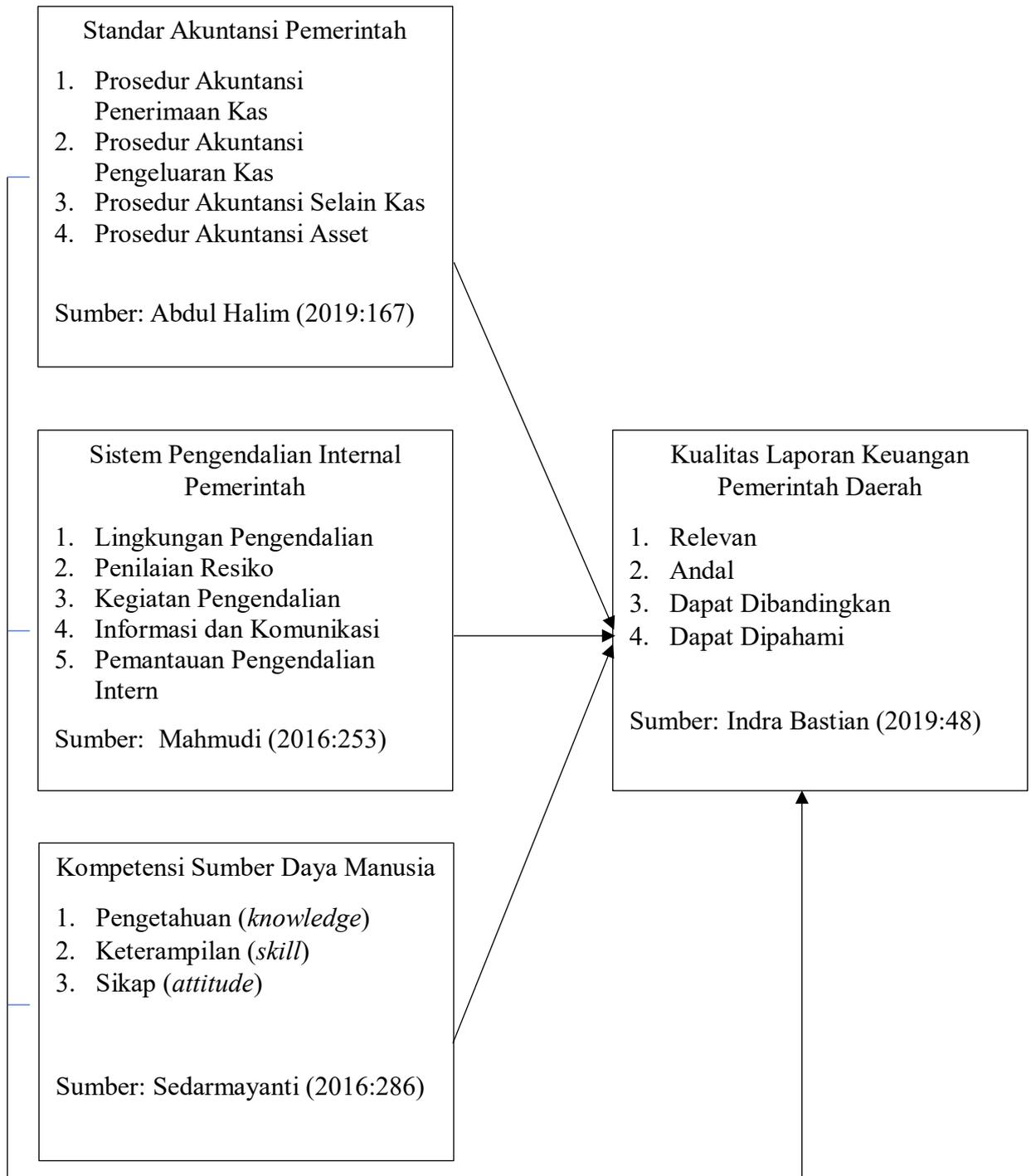
sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar dan membuat laporan keuangan relevan dan andal, sehingga semakin baik kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Admaja dan Wahyundaru (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, dengan terwujudnya penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan benar maka laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan berkualitas dengan baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan pengembangan dan replika dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

keuangan Pemerintah Daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian hipotesis dalam bukunya, yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah karena hanya didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

- Hipotesis 1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Hipotesis 2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Hipotesis 3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Hipotesis 4 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.